

ABSTRAK

.Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol apabila dikaitkan dengan unsur bebas banjir maka Subtansi Pelayanan yang sesuai yaitu kondisi jalan tol yang terkait dengan indikator drainase yaitu saluran penampung dan tidak ada endapan. Dalam memberikan pelayanan pengelola jalan tol harus berpedoman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol. Salah satu contoh kasus banjir di tol JORR Cikunir pengguna jalan berhak melakukan gugatan kepada pengelola jalan tol. Karena tidak memperhatikan subtansi pelayanan kondisi jalan yaitu drainase aliran air yang tidak bisa menampung saluran air. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas terkait tanggung jawab pengelola jalan tol apabila melakukan pelanggaran Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol yang dikarenakan banjir.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa unsur bebas banjir termasuk di dalam Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol yang di dalamnya terdapat subtansi pelayanan kondisi jalan tol dan di salah satu indikatornya yaitu drainase. sehingga yang harus bertanggung jawab atas kerugian pengguna jalan tol karena terjebak banjir yang berkaitan dengan standar pelayanan minimal jalan tol yaitu pengelola jalan tol.

Kata Kunci : Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, Pengelola Jalan Tol, Pengguna Jalan Tol.

ABSTRACT

Standard Minimum Toll Road Services if associated with flood-free elements then the corresponding Service Sub-Section is the toll road code associated with the drainage indicator that is the passenger channel and no sediment. In providing toll road management service must be guided in accordance with Minimal Service Standard of Toll Road. One example of a flood case in JORR Cikunir toll road users is entitled to a lawsuit to the toll road manager. Because it does not pay attention to the substance of service road condition that is drainage of water flow that can not accommodate water channel. Therefore, this research will discuss related to the responsibility of toll road management if violation of Minimal Toll Road Service Standard caused by flood.

This research method uses the type of normative research with statutory approach approach (statute approach).

The results of this study indicate that the flood-free element is included in the Minimum Standards of Toll Road Service in which there are substance services toll road conditions and in one of the indicators is drainage. So that should be responsible for the loss of the toll road mixer due to trapped floods associated with the minimum service standards of toll roads that are toll road managers.

Keywords: Minimal Service Standard of Toll Road, Toll Road Management, Toll Road User.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat	4
1.4.1 Teoritis	4
1.4.2 Secara Praktis	5
1.5 Keaslian	5
1.6 Metode Penelitian	6
1.6.1 Jenis Penelitian	7
1.6.2 Metode Pendekatan	7
1.6.3 Data Penelitian	7
1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.8 Analisa Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL	10
2.1 Jalan Tol	11
2.1.1 Pengguna Jalan Tol	12
2.1.2. Pengelola Jalan Tol	13
2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen Pengguna Jalan Tol	15
2.2.1 Hak Pengguna Jalan Tol	15
2.2.2 Kewajiban Pengguna Jalan Tol	16

2.3 Hak dan Kewajiban Pengelola Jalan Tol	18
2.3.1 Hak Pengelola Jalan Tol	18
2.3.2 Kewajiban Pengelola Jalan Tol	19
2.4 Standar Pelayanan Minimal	19
2.5 Tanggung Jawab Pelaku Usaha	22
2.6 Perlindungan Hukum	26
 BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA.....	 28
3.1 Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan.....	29
3.2 Tanggung Jawab Pengelola Jalan Tol Terhadap Kerugian Konsumen Yang Diakibatkan Banjir	39
3.2.1 Penyelesaian Penggantian Kerugian Seketika Secara Langsung Dengan Jalan Damai	44
3.2.2 Tuntutan Penggantian Kerugian Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	46
3.2.3 Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase	47
3.2.4 Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan	48
 BAB IV PENUTUP	 52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran	53
 DAFTAR PUSTAKA	 54